

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan kerap kali dikaitkan dengan negara yang sedang berkembang. Negara berkembang memiliki beberapa karakteristik yang membuat negara tersebut sulit menjadi negara maju, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih terbilang rendah. Ketiga karakteristik diatas kerap kali mengakibatkan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan merupakan masalah besar di mayoritas Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang berkepanjangan dalam sejarah Negara Indonesia, karena selama ini penerapan kebijakan pemerintah belum terlaksana secara optimal dan belum benar-benar menjangkau lapisan yang paling miskin. Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan perbaikan kualitas SDM dengan pendidikan yang memadai, banyak penduduk yang tidak mampu meneruskan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya karena keterbatasan biaya. Memang betul bahwa pemerintah sedang menggalakkan program sekolah gratis, namun sayangnya pendidikan gratis itu terbatas bagi sekolah negeri saja.

Hal tersebut terjadi dikarenakan, adanya kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikan itu sendiri, mulai dari biaya yang tidak terjangkau bagi mereka yang bersekolah di sekolah swasta,

biaya seragam dan keperluan sekolah lainnya, hingga akses menuju sekolah yang tidak bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Kemiskinan telah membuat banyak anak-anak tidak bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai fasilitas kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan kemiskinan mengakibatkan masyarakat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan sekedarnya. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat mengorbankan apa saja demi keselamatan, dan menerima upah sekecil apapun walaupun tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin¹

¹ Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, "Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan", *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, 2003, Hal. 191 – 324

Tabel 1.1
Data jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Banten	702.400	5,90%
DKI Jakarta	389.900	3,93%
D.I. Yogyakarta	550.200	14,91%
Jawa Barat	4.435.700	9,53%
Jawa Tengah	4.577.000	13,58%
Jawa Timur	4.789.100	12,34%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2015

Menurut data tahun 2015, untuk di pulau Jawa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu sekitar 4,7 juta jiwa. Dan berdasarkan presentase penduduk miskin, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ketiga termiskin di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan satu permasalahan serius yang terjadi di Jawa Timur.

Salah satu pencapaian dari pemerintahan daerah Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011 sebanyak 13,85% dari jumlah penduduk sebanyak 37,8 juta jiwa. Pada tahun 2015, turun menjadi 12,66% dari jumlah penduduk sebanyak 38,6 juta jiwa (Tabel 1.2). Namun demikian meskipun demikian kemiskinan menunjukkan trend yang menurun, angkanya masih cukup tinggi.

Tabel 1.2
Data Kemiskinan Di Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2011	37.840.657	5.227.200	13,81%
2012	38.106.590	4.960.200	13,11%
2013	38.363.195	4.893.000	12,93%
2014	38.610.202	4.748.400	12,55%
2015	38.847.561	4.789.100	12,66%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jawa Timur Dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional²

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Jawa Timur. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, salah satunya besarnya angka kemiskinan.

Jumlah masyarakat miskin Jawa Timur periode 2011-2015 berjalan seiring dengan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (Tabel 1.3). Periode 2011-2015 saat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat tingkat kemiskinan menurun, namun terjadi anomali pada tahun 2015 dimana laju pertumbuhan ekonomi meningkat dan jumlah penduduk miskin meningkat. Hal ini terjadi karena masyarakat kota yang kurang bisa mencari sumber penghasilan tambah, sedangkan di pedesaan terjadi peningkatan hasil usaha dan masyarakat bawah yang memperoleh kesempatan³

² Michael P Todaro, Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hal 105

³ Amel, BPS Jawa Timur: Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan Meningkat, <http://suaramandiri.com/peristiwa/item/5427-bps-jawa-timur-jumlah-penduduk-miskin-perkotaan-jatim-meningkat> (diakses pada 21 Maret 2017, pukul 17.32)

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Konstan) dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	PDRB (dalam miliar rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2011	5.227.200	1.054.979	6,49%
2012	4.960.200	1.124.299	6,57%
2013	4.893.000	1.195.144	6,30%
2014	4.748.400	1.267.860	6,08%
2015	4.789.100	1.340.517	5,73%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Di Indonesia, berbagai tahun terbitan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4
Jumlah Lulusan per Tingkat Pendidikan (SMA Sederajat-Kuliah) Jawa Timur Tahun
2011-2015

Tahun	Partisipan Pendidikan
2011	2.601.736
2012	2.661.503
2013	2.690.593
2014	2.713.328
2015	2.739.081

Sumber : Badan Pusat Statistik, Laporan Eksekutif Pendidikan Jawa Timur, berbagai tahun terbitan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa berkualitas buruk, maka bangsa tersebut akan menjadi negara yang tertinggal di masa yang akan datang. Pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang bodoh yang mengalami kemiskinan ataupun sebaliknya. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kebodohan bisa mengakibatkan kemiskinan, dan kemiskinan kerap kali dikaitkan dengan kebodohan. Ditambah lagi dengan persyaratan untuk memperoleh pekerjaan masa kini yang mewajibkan sang pelamar harus memiliki minimal ijazah SMA sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan. Di Jawa Timur tingkat pendidikan dapat diukur salah satunya dengan persentase tingkat pendidikan terakhir warga. Dan berdasarkan tabel 1.4 tingkat pendidikan (SMA – Universitas) di Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami kondisi naik turun.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan⁴. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

⁴ Deni A Tisna. "Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004". *Kumpulan Skripsi UNDIP*: Semarang, 2008

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur semakin menurun sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut dipengaruhi oleh seimbangannya laju PDRB atas harga konstan yang meningkat per tahun dengan laju jumlah penduduk miskin per tahun
2. Tingkat lulusan sekolah pada jenjang SMA sederajat – perguruan tinggi yang rendah seiring dengan perubahan jumlah penduduk miskin, pada efek jangka panjang penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan atau memiliki pendidikan yang rendah akan memiliki kualitas SDM yang kurang baik sehingga akan berujung pada meningkatnya kemiskinan

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi. Berhubung adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-variabel yang dinilai berpengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan hasil studi dan literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah: Laju PDRB atas harga konstan, dan tingkat pendidikan. Untuk itu dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis “Pengaruh PDRB, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011 – 2015”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011 – 2015?
2. Apakah terdapat pengaruh antara angka tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011 – 2015?
3. Apakah terdapat pengaruh antara PDRB dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011 – 2015?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai masalah kemiskinan dan variabel-variabel yang dinilai berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan manfaat bagi beberapa pihak, yakni sebagai berikut

- a. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam menyusun model perencanaan penerimaan pajak, dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, juga diharapkan agar dapat ditemukannya penyebab permasalahan kemiskinan sehingga jalan keluar atas permasalahan kemiskinan di Jawa Timur tersebut dapat terpecahkan.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.